

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontestasi politik pada tingkat Nagari atau yang disebut Pilwana tidak kalah meriah bila dibandingkan dengan kontestasi politik daerah dan pusat. Hal ini bisa dibuktikan dengan hingga keikutsertaan masyarakat dalam Pemilihan Wali Nagari. Tentu hal ini tidak semata-mata karena pilihan Wali Nagari merupakan salah satu kewajiban yang diemban oleh warga negara untuk memilih pemimpinnya tingkat Nagari. Dan juga akan melahirkan kaum elit yang akan mengurus masalah-masalah pemerintahan pada tingkat Nagari.

Pemilihan Wali Nagari pada dasarnya sangat erat kaitanya dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang Hakiki dari adanya otonomi pemerintahan negara itu sendiri yang merupakan Kesatuan masyarakat hukum yang diakui keberadaannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu terciptanya pemerintahan Nagari yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat negeri.

Dijelaskan pemilihan Wali Nagari merupakan refleksi bagaimana demokrasi ini diimplementasikan dan juga dikatakan sebagai sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Pemilihan Wali nagari diharapkan sebagai langsung membuat masyarakat akan hak dan kewajibannya sehingga pemilihan itu merupakan suatu momen dan dimana masyarakat mengerti dengan posisinya sebagai warga dalam perantauan politik di Negara tersebut. Karena terjadinya proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,

Dimuat pada UU Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini menerangkan bahwasanya pemilihan kepala desa diselenggarakan serentak di semua kabupaten/kota, dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menentukan aturannya penyelenggaraan pemilu tersebut dengan regulasi daerah kabupaten/kota. Berikut penjelasan lebih rinci pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Penyelenggaraan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Tahapan yang mesti dilewati calon Kepala Desa adalah pencalonan, pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengumuman calon Kepala Desa.

Dalam pemilihan kepala desa, perempuan memiliki peran penting untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, dinyatakan pada pasal 22E UUD 1945 ayat (1). Isinya adalah “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Setiap 5 tahun sekali, mengenai Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa perempuan harus berperan dalam pemilihan tersebut berlawanan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak punya kekuatan hukum mengaitkan. Terkhusus dalam penyelenggaraan Pilkadaes dasar pelaksanaannya dapat dilihat pada pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Terjadinya pertarungan kontestasi politik dimana setiap terjadinya pertarungan politik yaitu selalu kaum laki-laki yang menjadi pemenangnya. Sehingga adanya perwakilan perempuan yang mencoba ikut dalam kontestasi dimana beliau memberanikan diri untuk ikut bertarung dengan dukungan keluarga dan kerabatnya walaupun itu sulit, dimana kaum patriarki selalu menjadi pemimpin di Nagari tersebut sehingga budaya matrialisme seringkali dilupakan. Dengan adanya partisipasi politik bisa mematahkan dari budaya patriarki tersebut,

dimana adanya 5 calon dengan bertarung dalam kontetstasi tersebut membuat pertarungan sangat bagus dan sehingga terjadi sebuah kemengan dimiliki seorang perempuan dan disitu adapun respon dari masyarakat.

Namun, yang terpenting bagaimana cara memperkuat dalam kontestasi dalam pemilihan Wali Nagari dan tingkat partisipasinya maka sangat diperlukan bagi kalangan perempuan untuk ikut serta dalam kontestasi tersebut. Walaupun bicara Sumatera Barat kita adalah bagian dari pada kaum matrialinear, struktural sosial dalam masyarakat di nagari masih kental dengan kaum laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Sehingga ranah perempuan dalam politik masih masih dianggap sebagai ruang domestik. Dengan hal itu, keikutsertaan perempuan dalam kontestasi dalam pemilihan wali nagari dapat menjadikan atau wujud kontrol sosial walaupun perempuan sering di abaikan.

Dalam pemilihan Wali Nagari juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, budaya politik dan juga partisipasi politik, sebagian masyarakat Indonesia, terutama di perdesaan masih terdapat pola pikir yang patriarki yang menyakini bahwa laki-laki lebih menjadi pemimpin walaupun di Sumatera Barat adalah matrialisme dari pada itu perempuan hal ini menyebabkan minimnya perempuan dalam proses keikutsertaan dalam pencalonan Wali nagari, sehingga terjadi partisipasi perempuan mulai baru sadar dengan hal itu.

Adapun populasi pemilih di nagari tapan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah pemilih di nagari tapan

No	Keterangan	Populasi
1	Jumlah Pemilih	871 orang
2	Jumlah Laki-Laki	441 Orang
3	Jumlah Perempuan	430 Orang

Sumber : Pusat Pengelolaan Data dan Informasi (PPID) Nagari Tapan

Berdasarkan dari tabel diatas Ada nya berapa jumlah pemilihan dalam menentukan hak suara dalam kontestasi pemilihan Wali Nagari tersebut

Melalui latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang judul “kontestasi politik antara laki-laki dan perempuan dalam pemilihan wali nagari tapan ” dalam penelitian lapangan yang akan dilaksanakan oleh penulis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam kontestasi politik Pemilihan Wali Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Mengapa kaum perempuan ikut serta dalam kontestasi politik Pemilihan Wali Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Fokus Penelitian

1. Partisipasi perempuan dalam kontestasi politik Pemilihan Wali Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Ikut serta dalam kontestasi politik Pemilihan Wali Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan perempuan dalam keikutsertaan kompetisi politik.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadi dalam

kompetisi politik.

1.5 Manfaat Penelitian

Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya di masa akan mendatang.
2. Sebagai media pembelajaran untuk untuk menambah wawasan keilmuan mahasiswa terhadap orientasi politik masyarakat terhadap pemilihan wali nagari tapan kecamatan basa ampek balai kabupaten pesisir selatan..
3. manfaat selanjutnya dari penelitian ini ialah menambah pengetahuan masyarakat dan mahasiswa dalam pemilihan wali nagari tapan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pengawasan pilwana yang lebih baik.
4. Memberikan sumber informasi yang bersifat ilmiah kepada pembaca terutama disiplin Program Studi Ilmu Politik.

Praktis

1. Untuk mengetahui orientasi politik masyarakat terhadap pemilihan wali Nagari Tapan Kecamatan basa ampek balai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Manfaat lain dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi berkaitan dengan kekuasaan politik laki-laki dan perempuan ketika adanya kegiatan demokrasi..